

Dr. Hendri: Industrialisasi Nasional Harus Menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas

Updates. - KORLANTAS.ID

Jul 1, 2026 - 20:22



Dr. Ir. Hendri, ST., MT Wartawan Utama Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia (JNI)

OPINI - Setiap kali investasi baru diumumkan, publik biasanya disuguhi angka-angka besar: triliunan rupiah modal ditanamkan, ribuan hektare kawasan industri dibangun, kapasitas produksi meningkat, dan nilai ekspor bertambah. Para pejabat datang meresmikan pabrik, menekan tombol sirene, lalu menyampaikan bahwa industrialisasi Indonesia sedang bergerak maju.

Namun, ada pertanyaan yang jauh lebih penting daripada sekadar berapa besar nilai investasi yang masuk: pekerjaan seperti apa yang diciptakan? Apakah pekerja memperoleh upah yang layak? Apakah mereka mendapatkan kepastian kerja dan jaminan sosial? Apakah keselamatan mereka benar-benar dilindungi? Apakah tersedia kesempatan meningkatkan keterampilan dan jenjang karier? Apakah masyarakat di sekitar kawasan industri ikut naik kelas, atau hanya menjadi penonton ketika kekayaan alam dari daerahnya diolah dan dibawa ke pasar global?

Pertanyaan-pertanyaan itu harus menjadi pusat pembicaraan mengenai industrialisasi nasional. Sebab, pembangunan industri pada akhirnya bukan sekadar urusan mendirikan pabrik, memasang mesin, atau meningkatkan ekspor. Industrialisasi harus menjadi jalan untuk memperluas kesejahteraan, meningkatkan kemampuan manusia Indonesia, dan menciptakan pekerjaan yang bermartabat.

Pabrik yang megah, tetapi pekerjanya tetap hidup dalam ketidakpastian, bukanlah tanda keberhasilan industrialisasi. Investasi yang besar, tetapi hanya menghasilkan pekerjaan berupah rendah tanpa masa depan, juga tidak cukup untuk disebut sebagai kemajuan.

Industri sebagai Penggerak Ekonomi

Indonesia memang membutuhkan industrialisasi. Tidak mungkin sebuah negara dengan jumlah penduduk besar terus-menerus bergantung pada ekspor bahan mentah, konsumsi domestik, atau sektor ekonomi berproduktivitas rendah. Kita membutuhkan industri pengolahan yang kuat agar sumber daya alam memperoleh nilai tambah, teknologi berkembang, tenaga kerja semakin terampil, dan perekonomian nasional memiliki fondasi yang kokoh.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada triwulan pertama 2026, industri pengolahan memberikan kontribusi sekitar 19,07 persen terhadap produk domestik bruto dan tumbuh 5,04 persen secara tahunan. Kontribusi tersebut menjadikan industri pengolahan sebagai sektor terbesar dalam struktur perekonomian nasional. Pertumbuhan terutama ditopang oleh industri makanan dan minuman, logam, barang elektronik, peralatan listrik, serta industri kimia dan farmasi. [Badan Pusat Statistik](#)

Kementerian Perindustrian juga mencatat bahwa industri manufaktur menyerap sekitar 20,04 juta tenaga kerja pada Februari 2026. Angka tersebut menunjukkan bahwa manufaktur mempunyai posisi strategis, bukan hanya sebagai penghasil nilai tambah, tetapi juga sebagai sumber penghidupan bagi jutaan keluarga Indonesia. [Kementerian Perindustrian](#)

Dari sisi penanaman modal, realisasi investasi sepanjang semester pertama 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun dan dilaporkan menyerap 1.448.862 tenaga kerja Indonesia secara langsung. Investasi di luar Pulau Jawa bahkan mencapai 50,2 persen dari keseluruhan realisasi investasi. Sementara itu, investasi pada program hilirisasi mencapai Rp300,1 triliun atau sekitar 29,7 persen dari total investasi. [Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM](#)

Angka-angka tersebut patut diapresiasi. Akan tetapi, nilai investasi dan jumlah tenaga kerja yang terserap belum memberikan gambaran lengkap mengenai mutu pekerjaan yang diciptakan.

Kita belum mengetahui dari angka tersebut berapa banyak pekerja yang memperoleh perjanjian kerja yang jelas, upah layak, jaminan kesehatan, perlindungan kecelakaan kerja, pelatihan berkelanjutan, kebebasan berserikat, serta kesempatan untuk naik ke posisi dengan keahlian dan pendapatan lebih tinggi. Di sinilah ukuran keberhasilan industrialisasi perlu diperluas.

Pengangguran Rendah Belum Tentu Berarti Pekerjaan Berkualitas

Pada Februari 2026, jumlah penduduk bekerja di Indonesia mencapai 147,67 juta orang, sedangkan tingkat pengangguran terbuka berada pada angka 4,68 persen. Rata-rata upah buruh tercatat sebesar Rp3,29 juta per bulan. [Badan Pusat Statistik](#)

Penurunan tingkat pengangguran tentu merupakan perkembangan positif. Namun, rendahnya pengangguran tidak otomatis menunjukkan bahwa seluruh masyarakat telah memperoleh pekerjaan yang layak.

Pada periode yang sama, jumlah pekerja formal tercatat sekitar 59,93 juta orang, sedangkan pekerja informal mencapai 87,74 juta orang. Dengan membandingkan kedua angka tersebut, terlihat bahwa hanya sekitar empat dari setiap sepuluh pekerja yang berada dalam kegiatan formal, sedangkan hampir enam dari sepuluh masih bekerja secara informal. [Badan Pusat Statistik](#)

Pekerjaan informal tidak selalu identik dengan pekerjaan buruk. Banyak pengusaha kecil, pekerja mandiri, dan pelaku ekonomi kreatif yang tumbuh dari sektor informal. Akan tetapi, besarnya jumlah pekerja informal menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja masih menghadapi keterbatasan perlindungan, ketidakpastian pendapatan, akses pembiayaan yang sempit, dan jaminan sosial yang belum memadai.

Rata-rata upah nasional sebesar Rp3,29 juta juga tidak dapat dibaca secara sederhana. Angka rata-rata tidak menggambarkan variasi biaya hidup, kesenjangan upah antarwilayah, perbedaan sektor, maupun kebutuhan keluarga pekerja. Seseorang dapat tercatat bekerja, tetapi pendapatannya belum tentu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak.

Karena itu, kebijakan ketenagakerjaan tidak boleh berhenti pada pertanyaan apakah seseorang bekerja atau menganggur. Negara juga harus menanyakan apakah pekerjaan tersebut mampu memberikan penghidupan yang layak dan membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik.

Apa yang Dimaksud Pekerjaan Berkualitas?

Organisasi Perburuhan Internasional menempatkan empat unsur utama dalam

konsep pekerjaan layak, yaitu penciptaan lapangan kerja, perlindungan hak-hak pekerja, jaminan sosial, dan dialog sosial. Pekerjaan layak juga mencakup pendapatan yang adil, keamanan di tempat kerja, kesempatan mengembangkan diri, kesetaraan, serta kebebasan menyampaikan aspirasi dan berorganisasi. [International Labour Organization](#)

Dengan kerangka tersebut, pekerjaan berkualitas setidaknya harus mempunyai beberapa ciri.

Pertama, pekerjaan memberikan upah yang memungkinkan pekerja dan keluarganya hidup secara layak. Upah tidak boleh hanya dipandang sebagai biaya produksi yang harus ditekan serendah mungkin. Upah adalah bagian dari distribusi hasil produktivitas sekaligus sumber daya beli masyarakat.

Kedua, pekerja memperoleh kepastian mengenai hubungan kerjanya. Kontrak harus transparan, hak dan kewajiban dijelaskan, serta tidak boleh ada praktik yang sengaja mempertahankan pekerja dalam status tidak pasti hanya untuk menghindari tanggung jawab perusahaan.

Ketiga, pekerjaan dilaksanakan dalam lingkungan yang aman dan sehat. Keselamatan kerja tidak boleh dikorbankan untuk mengejar target produksi. Setiap kecelakaan yang dapat dicegah merupakan kegagalan tata kelola perusahaan dan pengawasan negara.

Keempat, pekerja memiliki akses terhadap jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan perlindungan ketika kehilangan pekerjaan.

Kelima, pekerjaan memberikan kesempatan untuk belajar dan naik kelas. Pekerja tidak semestinya menjalankan tugas yang sama selama puluhan tahun tanpa peningkatan keterampilan, pengakuan kompetensi, atau jenjang karier.

Keenam, tempat kerja harus bebas dari diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan. Perempuan, penyandang disabilitas, pekerja muda, dan kelompok rentan lainnya harus memperoleh kesempatan yang adil.

Ketujuh, pekerja memiliki ruang untuk menyampaikan kepentingannya melalui dialog yang sehat. Serikat pekerja tidak seharusnya dipandang sebagai musuh perusahaan. Hubungan industrial yang dewasa justru memerlukan organisasi pekerja yang bertanggung jawab dan pengusaha yang terbuka terhadap perundingan.

Dengan demikian, pekerjaan berkualitas bukan hanya pekerjaan dengan gaji tinggi. Ia merupakan gabungan antara pendapatan yang layak, perlindungan, keamanan, kesempatan berkembang, penghormatan terhadap hak, serta masa depan yang lebih pasti.

Amanat Konstitusi, Bukan Sekadar Pilihan Kebijakan

Kewajiban menciptakan pekerjaan yang berkualitas sesungguhnya telah diletakkan dalam konstitusi. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28D ayat (2) juga menjamin hak setiap orang untuk bekerja serta memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Sementara itu, Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan agar perekonomian diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan ekonomi nasional. [JDIH DPR RI](#)

Artinya, negara tidak cukup hanya membuka pintu investasi. Negara harus memastikan bahwa kegiatan investasi dan industrialisasi menghasilkan manfaat yang adil bagi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga menempatkan pembangunan industri sebagai sarana untuk mewujudkan struktur industri nasional yang kuat, berdaya saing, mandiri, dan berkeadilan. Orientasinya bukan sekadar pertumbuhan produksi, tetapi juga kemakmuran dan pemerataan pembangunan. [Peraturan.go.id](#)

Hal yang sama harus menjadi bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045. Transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 hanya akan berarti apabila transformasi tersebut ikut meningkatkan kualitas manusia dan kehidupan pekerja. [Peraturan.go.id](#)

Jadi, lapangan kerja berkualitas bukan bonus tambahan apabila perusahaan sedang memperoleh keuntungan besar. Ia merupakan bagian dari tujuan konstitusional pembangunan ekonomi.

Bahaya Industrialisasi yang Terputus dari Rakyat

Industrialisasi dapat tumbuh tanpa memberikan manfaat optimal kepada masyarakat apabila tidak dirancang dengan benar. Pertama, industri yang masuk dapat terlalu padat modal dan memiliki daya serap tenaga kerja yang terbatas. Investasi bernilai triliunan rupiah belum tentu menghasilkan banyak pekerjaan apabila hampir seluruh proses produksi dilakukan oleh mesin dan sistem otomatis.

Industri padat modal tetap dibutuhkan. Indonesia memerlukan industri baja, petrokimia, semikonduktor, energi, dan berbagai industri berteknologi tinggi. Namun, pemerintah harus menyeimbangkannya dengan pengembangan industri padat karya yang produktif serta industri berbasis pengetahuan yang menyediakan pekerjaan untuk berbagai tingkat keterampilan.

Kedua, industri dapat tumbuh sebagai enklave yang terpisah dari ekonomi lokal. Bahan baku, mesin, teknologi, tenaga ahli, dan jasa pendukung didatangkan dari luar, sedangkan masyarakat sekitar hanya memperoleh pekerjaan dengan keterampilan rendah. Ketika hubungan industri dengan pemasok domestik lemah, nilai tambah yang tinggal di dalam negeri menjadi terbatas.

Ketiga, terdapat ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan industri.

Perusahaan mengeluhkan kekurangan tenaga terampil, sementara lulusan sekolah kejuruan dan perguruan tinggi kesulitan memperoleh pekerjaan. Masalah tersebut menunjukkan bahwa pendidikan, pelatihan, investasi, dan perencanaan industri belum sepenuhnya berjalan dalam satu arah.

Keempat, persaingan menarik investasi dapat mendorong perlombaan menekan standar ketenagakerjaan. Pemerintah daerah atau pengelola kawasan industri dapat tergoda menawarkan buruh murah sebagai keunggulan. Strategi ini berbahaya karena menjebak Indonesia dalam struktur ekonomi berupah rendah.

Kelima, lemahnya pengawasan membuka ruang bagi pelanggaran. Aturan yang baik tidak akan berarti jika jumlah pengawas terbatas, pemeriksaan tidak berbasis risiko, sanksi tidak menimbulkan efek jera, dan pekerja takut melaporkan pelanggaran.

Keenam, keuntungan produktivitas tidak selalu dibagi secara adil. Perusahaan dapat mencatat peningkatan produksi dan laba, tetapi upah pekerja tidak bergerak sebanding. Akibatnya, industrialisasi memperbesar output tanpa memperkuat daya beli dan kesejahteraan masyarakat.

Kita tidak boleh membiarkan industrialisasi menghasilkan dua dunia yang saling bersebelahan: kawasan pabrik berteknologi maju di satu sisi, dan permukiman pekerja dengan pelayanan publik yang buruk di sisi lain.

Hilirisasi Harus Menghasilkan Mobilitas Sosial

Hilirisasi merupakan arah yang tepat karena Indonesia tidak boleh terus mengeksport bahan mentah. Namun, hilirisasi tidak boleh dipersempit menjadi pembangunan smelter atau fasilitas pengolahan tahap awal.

Hilirisasi harus diperdalam sampai pada industri bahan antara, komponen, barang akhir, teknologi produksi, riset, rekayasa, pemeliharaan mesin, logistik, pengolahan limbah, dan daur ulang. Semakin panjang rantai nilai yang dibangun di Indonesia, semakin beragam pula pekerjaan yang dapat diciptakan.

Kebijakan hilirisasi juga harus mempunyai strategi peningkatan keterampilan tenaga kerja. Pekerja lokal tidak boleh selamanya ditempatkan pada tingkat pekerjaan paling rendah, sementara posisi teknis, manajerial, dan rekayasa selalu diisi oleh tenaga dari luar.

Harus ada target yang terukur mengenai transfer pengetahuan, sertifikasi kompetensi, penggunaan tenaga ahli nasional, kemitraan dengan politeknik dan universitas, serta peningkatan posisi pekerja Indonesia dalam struktur perusahaan.

Pemerintah juga perlu memastikan keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pemasok. Kebutuhan makanan, seragam, alat keselamatan, transportasi, perawatan mesin, pengemasan, perangkat lunak, dan berbagai jasa pendukung seharusnya menjadi pintu masuk bagi pengusaha lokal.

Dengan cara itu, satu investasi besar tidak hanya menciptakan pekerjaan di dalam pagar pabrik, tetapi juga menumbuhkan ekosistem ekonomi di sekitarnya.

Teknologi Tidak Boleh Menyingkirkan Manusia

Perkembangan otomatisasi, robotika, dan kecerdasan buatan akan mengubah dunia industri. Menolak teknologi bukanlah pilihan. Tanpa modernisasi, produktivitas industri Indonesia akan tertinggal dan produk nasional sulit bersaing.

Namun, teknologi harus digunakan untuk meningkatkan kualitas kerja manusia, bukan sekadar mengurangi jumlah pekerja. Perusahaan yang menerima dukungan negara perlu diwajibkan menyusun rencana transisi tenaga kerja ketika melakukan otomatisasi. Pekerja yang posisinya terdampak harus memperoleh pemberitahuan yang memadai, pelatihan ulang, kesempatan berpindah ke fungsi baru, serta perlindungan pendapatan selama masa transisi.

Pemerintah, perusahaan, lembaga pendidikan, dan serikat pekerja harus memetakan pekerjaan yang berisiko hilang sekaligus pekerjaan baru yang akan muncul. Teknisi otomasi, analis data produksi, ahli keamanan siber industri, perancang sistem, operator mesin cerdas, tenaga perawatan, dan spesialis lingkungan merupakan contoh pekerjaan yang akan semakin dibutuhkan.

Masalahnya bukan apakah teknologi akan datang. Masalahnya adalah siapa yang akan menikmati manfaat produktivitas dan siapa yang harus menanggung biayanya.

Jika peningkatan produktivitas hanya menguntungkan pemilik modal, sementara pekerja kehilangan pekerjaan tanpa kesempatan belajar, teknologi akan memperbesar ketimpangan. Tetapi jika produktivitas dibagi melalui kenaikan pendapatan, pengurangan risiko kerja, peningkatan keterampilan, dan waktu kerja yang lebih manusiawi, teknologi dapat menjadi alat kemajuan bersama.

Investasi Harus Dinilai dengan Indikator Kualitas Pekerjaan

Selama ini keberhasilan investasi banyak diumumkan melalui nilai modal dan jumlah tenaga kerja yang terserap. Kedua indikator tersebut tetap penting, tetapi belum cukup.

Pemerintah perlu membangun indeks kualitas pekerjaan untuk setiap proyek investasi besar dan kawasan industri. Indeks tersebut dapat mengukur:

- Proporsi pekerja dengan hubungan kerja formal dan jelas.
- Tingkat upah dibandingkan dengan kebutuhan hidup dan produktivitas sektoral.
- Kepesertaan pekerja dalam jaminan sosial.

- Tingkat kecelakaan dan kepatuhan keselamatan kerja.
- Jam kerja dan pembayaran lembur.
- Investasi perusahaan dalam pelatihan pekerja.
- Perkembangan jenjang karier tenaga kerja lokal.
- Kesetaraan kesempatan bagi perempuan dan penyandang disabilitas.
- Kebebasan berserikat dan kualitas dialog sosial.
- Penggunaan pemasok serta tenaga ahli nasional.
- Ketahanan pekerjaan ketika perusahaan menghadapi perubahan pasar.
- Kepatuhan lingkungan dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.

Hasil penilaian harus diumumkan secara terbuka. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui perusahaan mana yang benar-benar memberikan manfaat bagi Indonesia dan perusahaan mana yang hanya mengejar keuntungan dengan memanfaatkan kelonggaran pengawasan.

Insentif seperti keringanan pajak, fasilitas lahan, kemudahan perizinan, akses energi, dan dukungan infrastruktur seharusnya dikaitkan dengan pencapaian indikator tersebut.

Prinsipnya sederhana: semakin besar fasilitas yang diberikan negara, semakin besar pula tanggung jawab perusahaan kepada pekerja dan masyarakat.

Kebijakan ini perlu diterapkan secara transparan, bertahap, dan konsisten agar memberikan kepastian bagi investor. Syarat yang jelas sejak awal justru lebih baik daripada perubahan kebijakan yang mendadak atau penegakan aturan yang tidak seragam.

Pendidikan Vokasi Tidak Boleh Menjadi Pabrik Buruh Murah

Pendidikan vokasi sering disebut sebagai jawaban atas kebutuhan industri. Namun, kita perlu berhati-hati agar sekolah menengah kejuruan, politeknik, dan balai latihan kerja tidak hanya menjadi pemasok tenaga murah untuk pekerjaan berulang.

Pendidikan vokasi harus membangun kemampuan teknis sekaligus kemampuan

belajar sepanjang hayat. Teknologi industri dapat berubah dengan cepat. Keterampilan yang dibutuhkan hari ini mungkin menjadi usang dalam beberapa tahun. Karena itu, peserta didik perlu dibekali dasar matematika, teknologi digital, komunikasi, pemecahan masalah, keselamatan kerja, dan kemampuan beradaptasi.

Program pemagangan juga harus menjadi proses pendidikan yang berkualitas, bukan cara memperoleh tenaga kerja murah tanpa perlindungan. Peserta magang harus mempunyai kurikulum, pembimbing, batas waktu, standar keselamatan, uang saku yang layak, dan pengakuan kompetensi.

Pada 2026, pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja bersama ILO telah menyusun rekomendasi tripartit untuk memperkuat sistem pemagangan berkualitas di Indonesia. Langkah semacam ini perlu ditindaklanjuti dalam regulasi dan pengawasan yang nyata. [International Labour Organization](#)

Perusahaan juga harus berbagi tanggung jawab dalam pendidikan tenaga kerja. Jangan sampai perusahaan terus mengeluhkan ketidaksesuaian keterampilan, tetapi enggan berinvestasi dalam pelatihan.

Upah Layak Bukan Musuh Investasi

Sebagian pihak berpendapat bahwa peningkatan standar ketenagakerjaan akan membuat biaya produksi naik dan investor berpindah ke negara lain. Kekhawatiran tersebut perlu diperhitungkan, tetapi tidak boleh dijadikan alasan mempertahankan strategi buruh murah.

Investor tidak hanya mempertimbangkan upah. Mereka juga memperhitungkan produktivitas, kepastian hukum, kualitas infrastruktur, ketersediaan energi, kemampuan pemasok, stabilitas sosial, efisiensi logistik, dan kualitas tenaga kerja.

Upah murah tanpa produktivitas tidak akan menciptakan daya saing yang sehat. Sebaliknya, tenaga kerja terampil dengan produktivitas tinggi mampu menghasilkan barang bernilai tambah besar dan mendukung industri yang lebih maju.

Indonesia tidak akan pernah menjadi negara berpendapatan tinggi jika keunggulan utamanya terus-menerus berupa tenaga kerja murah. Kita harus berpindah dari strategi menekan biaya manusia menuju strategi meningkatkan produktivitas manusia.

Kenaikan produktivitas seharusnya mempunyai hubungan yang jelas dengan peningkatan pendapatan pekerja. Perusahaan dapat mengembangkan skema pembagian keuntungan, bonus produktivitas, dan jenjang upah berdasarkan kompetensi. Dengan demikian, pekerja merasakan bahwa peningkatan kemampuan dan keberhasilan perusahaan turut memperbaiki kehidupannya.

Upah yang lebih baik juga kembali ke perekonomian dalam bentuk konsumsi rumah tangga. Pekerja yang memiliki daya beli akan menghidupkan perdagangan, perumahan, pendidikan, transportasi, dan berbagai usaha lokal.

Karena itu, upah tidak hanya menjadi biaya perusahaan, tetapi juga sumber permintaan bagi perekonomian nasional.

Mebutuhkan Kerja Bersama

Pemerintah pusat harus menyelaraskan kebijakan investasi, industri, perdagangan, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Jangan sampai satu kementerian mengejar nilai investasi, sementara kementerian lain harus menanggung dampak hubungan kerja yang rapuh atau kebutuhan pelatihan yang tidak dipersiapkan.

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kawasan industri terhubung dengan perumahan layak, transportasi publik, fasilitas kesehatan, pendidikan, air bersih, dan pengelolaan lingkungan. Kota industri bukan hanya kumpulan pabrik, melainkan ruang hidup bagi pekerja dan keluarganya.

Perusahaan harus melihat pekerja sebagai aset jangka panjang. Investasi pada keselamatan, keterampilan, dan kesejahteraan pekerja bukan tindakan amal, tetapi bagian dari strategi produktivitas dan keberlanjutan usaha.

Serikat pekerja harus memperkuat kapasitasnya agar tidak hanya bereaksi ketika terjadi perselisihan. Serikat perlu terlibat dalam pembicaraan mengenai pelatihan, otomatisasi, keselamatan, produktivitas, dan masa depan industri.

Lembaga pendidikan harus lebih terbuka terhadap perubahan teknologi, tetapi tetap menjaga fungsi pendidikan sebagai sarana memanusiakan manusia. Pendidikan tidak boleh hanya tunduk pada kebutuhan jangka pendek pasar kerja.

Lembaga keuangan juga dapat berperan dengan memasukkan kualitas pekerjaan ke dalam penilaian pembiayaan. Perusahaan yang mempunyai standar ketenagakerjaan buruk, tingkat kecelakaan tinggi, dan konflik industrial berkepanjangan sesungguhnya menyimpan risiko bisnis yang besar.

Adapun masyarakat dan media harus ikut mengawasi agar keberhasilan industri tidak hanya dinarasikan melalui nilai investasi, luas kawasan, dan volume ekspor. Kondisi pekerja, dampak lingkungan, serta perkembangan ekonomi lokal harus mendapatkan perhatian yang sama.

Industrialisasi yang Memuliakan Manusia

Indonesia sedang berada dalam periode penting. Bonus demografi, hilirisasi sumber daya alam, pertumbuhan ekonomi digital, pergeseran rantai pasok global, serta perkembangan teknologi membuka peluang besar bagi industrialisasi nasional.

Namun, peluang tersebut dapat berubah menjadi masalah apabila jutaan tenaga kerja hanya ditempatkan sebagai buruh murah tanpa perlindungan dan tanpa kesempatan naik kelas.

Kita memerlukan industrialisasi yang menjadikan manusia sebagai pusat pembangunan. Setiap pabrik baru seharusnya membawa pengetahuan baru.

Setiap investasi seharusnya memperkuat kemampuan nasional. Setiap peningkatan produktivitas seharusnya memperbaiki kesejahteraan pekerja. Setiap kebijakan hilirisasi seharusnya memperluas kesempatan bagi tenaga kerja dan pengusaha lokal.

Ukuran kemajuan tidak boleh berhenti pada berapa banyak modal yang masuk. Kita harus melihat berapa banyak keluarga yang kehidupannya menjadi lebih baik, berapa banyak pekerja yang meningkat keterampilannya, berapa banyak anak muda yang memperoleh masa depan, serta berapa banyak usaha nasional yang berhasil masuk ke dalam rantai nilai industri.

Industrialisasi adalah alat, bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah kemakmuran rakyat, kemandirian bangsa, dan kehidupan yang bermartabat. Karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menciptakan lapangan kerja. Indonesia harus menciptakan lapangan kerja yang membuat manusia tumbuh, terlindungi, dihargai, dan mampu menatap masa depan dengan percaya diri. Jika industrialisasi gagal menghadirkan hal tersebut, kita mungkin berhasil membangun banyak pabrik, tetapi belum berhasil membangun bangsa.

Jakarta, 15 Agustus 2026

Dr. Ir. Hendri, ST., MT

Wartawan Utama

Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia (JNI)